

Panduan OECD

untuk Perusahaan Multi Nasional

Alat Bantu untuk Pelaksanaan Bisnis yang Bertanggung Jawab



Tentang Panduan OECD untuk Perusahaan Multi Nasional

Panduan OECD untuk Perusahaan Multi Nasional (“Panduan”) merupakan rekomendasi yang didukung pemerintah tentang pelaksanaan bisnis yang bertanggung jawab di seluruh dunia. Panduan ini meliputi beragam topik, termasuk hak asasi manusia, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, pengungkapan, korupsi dan pajak. Mekanisme resolusi ketidaksepahaman yang berhubungan dengan Panduan merupakan instrumen unik untuk menyoroti isu kurang tepatnya manajemen perusahaan. Brosur ini memberikan gambaran umum Panduan dan mekanisme penyampaian pengaduan terkait.

Gambaran Umum Panduan

Kata Pengantar

Panduan ini terdiri dari standar dan prinsip sukarela, tapi negara yang menganut Panduan terikat pada komitmen pelaksanaannya.

Bab I Konsep dan Prinsip

Panduan ini berlaku untuk semua sektor ekonomi dan untuk semua operasional global dari perusahaan yang bekerja dalam atau untuk OECD beserta negara-negara pesertanya.

Bab II Kebijakan Umum

Perusahaan harus beroperasi sesuai dengan hukum dan peraturan-peraturan domestik, dan perilakunya memberikan kontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Perusahaan harus memperkirakan, mencegah dan memitigasi (misalnya melaksanakan penyelidikan menyeluruh atas) semua dampak yang muncul dari aktivitasnya serta di seluruh mata rantai suplai dan hubungan bisnis lainnya. Perusahaan harus menjalin hubungan yang bermakna dengan pihak yang berkepentingan, berpegang pada prinsip pelaksanaan bisnis yang baik dan menjauh dari keterlibatan yang tidak tepat dalam aktivitas politik.

Bab III Pengungkapan

Perusahaan harus mengungkapkan segala material yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitasnya, struktur, performa keuangan dan non-keuangan (misalnya sosial dan lingkungan hidup), kepemilikan dan pelaksanaan. Perusahaan juga harus mengungkapkan informasi tentang hubungan-hubungan bisnis dan aktivitas-aktivitasnya serta dampak dari hubungan tersebut.

Bab IV Hak Asasi Manusia

Perusahaan harus menghormati hak asasi manusia, baik dalam praktek dan melalui komitmen kebijakan. Perusahaan harus melaksanakan penyelidikan menyeluruh atas hak asasi manusia sesuai ketentuan untuk memperkirakan dan menyatakan dampak hak asasi manusia yang aktual dan potensial, dan memiliki proses-proses yang memungkinkan terjadinya remediasi.

Bab V Ketenagakerjaan dan Hubungan Industri

Perusahaan harus menghormati standar dasar hak pekerja dan menyediakan kondisi kerja yang layak serta upah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja dan keluarganya.

Bab VI Lingkungan Hidup

Perusahaan harus mengidentifikasi, mencegah, dan memitigasi dampak yang berbahaya bagi lingkungan, kesehatan masyarakat dan keamanan. Penetapan sistem manajemen lingkungan hidup harus dilaksanakan dan secara berkesinambungan meningkatkan performa lingkungan, termasuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

Bab VII Suap dan Korupsi

Perusahaan tidak boleh menawarkan atau menerima suap, baik secara langsung maupun tidak langsung. Perusahaan harus memiliki etika yang tepat dan program yang sesuai serta kendali internal yang ditempatkan untuk mencegah dan mendeteksi suap. Perusahaan harus transparan dalam menunjukkan upaya pemberantasan korupsi.

Bab VIII Minat Pelanggan

Perusahaan harus menjalankan pemasaran yang adil dan mengamalkan iklan; memastikan kualitas dan ketahanan produk serta layanan dengan informasi yang akurat dan dapat diverifikasi, sehingga pelanggan dapat membuat keputusan dengan jelas.

Bab IX Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perusahaan harus berkontribusi terhadap perkembangan kapasitas inovatif lokal dan nasional melalui transfer teknologi, penganugerahan hak kekayaan intelektual dan mempekerjakan staf lokal.

Bab X Kompetisi

Perusahaan harus patuh pada hukum dan regulasi kompetisi, serta tidak terlibat dalam perilaku anti-kompetisi.

Bab XI Pajak

Perusahaan harus berkontribusi pada keuangan publik negara domisili melalui pembayaran pajak yang tepat waktu yang disertai dengan berkas dan loyalitas pada hukum dan regulasi pajak. Perusahaan harus menghindari dari pemindahan laba atau rugi untuk mengurangi beban pajaknya.

Bagaimana Caranya Mengajukan Pengaduan?

Pada pengaduan langkah demi langkah berikut ini, OECD Watch menjelaskan proses yang dapat diikuti oleh CSO, organisasi lain dan perorangan untuk mengajukan pengaduan Panduan OECD, untuk menyiapkan tindak lanjut dan mediasi setelah pengaduan. Untuk panduan lebih lengkap, silakan lihat Panduan OECD untuk Perusahaan Multi Nasional (dapat diakses di www.oecdwatch.org)

Pertimbangan Pengaduan

- Definisikan dengan jelas pelanggaran yang terjadi dan tentukan perusahaan mana yang menurut Anda terlibat atau bertanggung jawab.
- Pertimbangkan manfaat pengaduan juga keterbatasan mekanisme. Pertimbangkan apakah strategi lain akan lebih efektif atau efisien. Strategi yang berkesinambungan juga mungkin efektif.
- Proses penerimaan pengaduan membutuhkan waktu dan sumber daya.

Aspek Kunci Pembaruan Panduan OECD 2011

Pada Mei 2011, pemerintah yang tergabung dalam OECD serta negara-negara terkait mengadopsi pembaruan Panduan OECD. Meskipun beberapa masih ada beberapa kekurangan mendasar seperti kurangnya mekanisme kontrol pelaksanaan, pembaruan ini memperkenalkan syarat-syarat mendasar pada area seperti penyelidikan menyeluruh atas dampak tidak diinginkan yang mungkin muncul (*due diligence*), tanggung jawab berantai dan hak asasi manusia. NCP (National Contact Point-Kontak Nasional) harus mengikuti prosedur yang penyampaian pengaduan yang telah diperbaiki.

Due Diligence: *Due diligence* merupakan proses dimana perusahaan secara aktif mengidentifikasi, mencegah dan memitigasi serta dipertimbangkan dari cara mereka menangani dampak aktual dan potensial yang tidak diinginkan. Proses ini terdiri dari pertimbangan dampak aktual dan potensial, integrasi dan tindakan atas temuan tersebut, pelacakan respon serta cara mengkomunikasikan dampak tersebut. Panduan OECD mengharuskan perusahaan untuk melaksanakan *due diligence* untuk isu yang termasuk dalam panduan, diantaranya hak asasi manusia, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, korupsi dan minat pelanggan.

Tanggung Jawab Berantai: Panduan ini berlaku untuk segenap entitas perusahaan, termasuk anak cabang yang terkait, waralaba, dan semua hubungan bisnis seperti suplier dan sub-kontraktor. Mereka bukan hanya harus mencari cara untuk menghindari dari menyebabkan atau berkontribusi terhadap dampak yang tidak diinginkan, tapi juga harus berusaha keras mencegah dampak

yang tidak diinginkan dari produk atau layanan yang mereka sediakan. Perusahaan diharapkan untuk mempublikasikan hubungan mereka dengan semua rekan bisnis dan dampak yang disebabkan oleh rekan bisnis.

Hak Asasi Manusia dan Keterlibatan Pihak yang Berkepentingan: Panduan menekankan bahwa perusahaan harus menghormati hak asasi manusia, dimanapun mereka beroperasi. Perusahaan harus berusaha menghindari atau tidak berkontribusi terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan menjalin hubungan yang bermakna dengan orang-orang atau komunitas yang telah terpengaruh.

Tampilan NCP: NCP (National Contact Point-Kontak Nasional) harus obyektif, dapat diperkirakan, dan setara dalam penanganan keluhan. NCP harus memprioritaskan transparansi, menentukan dan mengikuti jadwal, melaksanakan prosedur yang dapat diperkirakan serta terlihat dan dapat diakses pihak-pihak yang berkepentingan.

2**Lengkapi Pertanyaan-pertanyaan Ini:**

- Pertimbangkan apakah masalah Anda termasuk isu yang ada dalam Panduan OECD. Identifikasi bab dan syarat yang mana yang telah dilanggar.
- Petakan keterlibatan dan hubungan entitas perusahaan dalam permasalahan tersebut (misalnya induk perusahaan, anak cabang, perusahaan gabungan, pendana, rantai supplier, dan hubungan bisnis lainnya).
- Identifikasi NCP (National Contact Point-Poin Kontak Nasional) yang tepat dan peraturan mereka untuk penyampaian keluhan.

3**Identifikasi hasil yang diinginkan:**

- Identifikasi tuntutan Anda pada perusahaan tersebut (misalnya perubahan kebijakan atau praktek spesifik, mencegah terjadinya kekerasan, remediasi dampak yang tidak diinginkan, dst).
- Spesifikasi permintaan Anda pada NCP (National Contact Point-Poin Kontak Nasional). Misalnya fasilitasi, melaksanakan pencarian fakta, penilaian ketaatan, rekomendasi isu, dll.
- Tentukan isu mana yang bisa Anda kompromikan dan yang mana yang tidak dapat dinegosiasikan.
- Pertimbangkan hasil positif dan negatif dari pengaduan Anda (misalnya perbaikan kebijakan pemerintah, perubahan praktek industri, meningkatnya kesadaran publik melalui publikasi, dll).



OECD dan NCP

(National Contact Point - Poin Kontak Nasional)

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development-Organisasi untuk Kerja Sama dan Pertumbuhan Ekonomi) merupakan organisasi pemerintah yang terdiri dari 34 negara. Tujuannya untuk mengembangkan dan mempromosikan kebijakan sosial dan ekonomi. Selain negara anggota, terdapat 9 negara non-OECD yang terikat pada Deklarasi Investasi OECD, yang termasuk di dalamnya Panduan OECD untuk Perusahaan Multi Nasional.

Pemerintah yang terikat pada Panduan harus menetapkan NCP (National Contact Point-Poin Kontak Nasional) untuk mempromosikan Panduan dan menangani pengaduan tentang dakwaan 'kejadian spesifik' penyimpangan pelaksanaan oleh perusahaan. Prosedur pengaduan 'kejadian spesifik' berfokus pada resolusi antara pihak-pihak yang terlibat melalui dialog yang dimediasi. Jika upaya ini gagal, NCP dapat

membuat pernyataan untuk menentukan apakah Panduan telah dilanggar dan membuat rekomendasi untuk pelaksanaan Panduan yang lebih baik.

Semua anggota OECD dan non anggota OECD harus punya NCP yang berfungsi. Meskipun semua NCP merupakan kantor pemerintah, NCP tidak memiliki struktur yang sama dan berlokasi di departemen yang sama. Beberapa NCP berlokasi di sebuah kantor pemerintah. Yang lain berupa 'multi partite' dan bisa termasuk di dalamnya perwakilan dari bisnis, perserikatan, dan LSM sebagai bagian integral dari NCP. NCP yang dapat berfungsi dengan baik dianggap sebagai ahli independen atau telah memiliki 'dewan pemantau' eksternal yang mampu memberikan pengawasan. Seluruh NCP harus mudah diakses, terlihat, transparan dan bertanggung jawab.

4

Menulis pengaduan:

OECD Watch telah mengembangkan templat yang dapat digunakan CSO untuk menulis pengaduan yang jelas, lengkap, padat dan persuasif. Minimal, pengaduan harus menyertakan: identitas pengadu; dakwaan pelanggaran; keterlibatan atau kontribusi perusahaan pada masalah terkait; syarat Panduan OECD yang telah dilanggar; bukti yang mendukung dakwaan pelanggaran; tuntutan pada perusahaan; permintaan pada NCP.

5

Pengajuan pengaduan dan keterlibatan dalam prosesnya:

Pengaduan harus diajukan pada NCP yang tepat, baik melalui email atau pos. Proses NCP termasuk beberapa tahap, diantaranya:

- **Pengkajian awal:** NCP mempertimbangkan apakah pengaduan tersebut layak diselidiki lebih lanjut. Anda dapat mengantisipasi dengan menulis beberapa tanggapan pada NCP untuk memberikan informasi tambahan dan klarifikasi.
- **Mediasi:** NCP berupaya mempertemukan pihak-pihak yang terlibat untuk mediasi yang bertujuan untuk mencapai solusi yang disepakati bersama. Bersiaplah untuk menghadiri pertemuan dengan NCP dan perusahaan sebagai bagian dari mediasi.
- **Penentuan:** Jika mediasi gagal, NCP dapat membuat pengkajian dakwaan pelanggaran.



Siapa, Apa, Kapan, Dimana dan Mengapa Mengajukan Pengaduan

Prosedur yang telah ditetapkan NCP untuk menangani pengaduan berbeda dari satu NCP dengan NCP lain. Sangatlah penting untuk melihat aturan tertentu yang telah diadopsi NCP sebelum menyusun dan mengajukan pengaduan. Peraturan yang berlaku untuk semua NCP termasuk yang berikut ini:

Siapa: 'Pihak yang tertarik' dapat mengajukan pengaduan. Ini termasuk serikat perdagangan, dan LSM serta pekerja, komunitas dan perorangan yang menanggung dampak negatif akibat aktivitas perusahaan.

Apa: Pengaduan dapat diajukan pada perusahaan dari atau beroperasi dalam OECD atau negara yang terikat, terkait dengan aktivitasnya di seluruh dunia. Ini termasuk dampak yang tidak diinginkan melalui mata rantai suplai dan hubungan bisnis untuk pelanggaran apapun yang termasuk ke dalam Panduan.

Kapan: Pengaduan dapat diajukan untuk pelanggaran di masa lalu yang belum terselesaikan, untuk pelanggaran yang sedang terjadi, untuk pelanggaran yang mungkin

terjadi jika perusahaan meneruskan aktivitas yang telah direncanakan, dimana rencana tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan due diligence.

Dimana: Pengaduan harus dilaksanakan pada NCP negara dimana pelanggaran tersebut berlangsung. Jika negara domisili tidak memiliki NCP, pengaduan harus diajukan pada NCP negara asal dimana kantor utama perusahaan tersebut berada. Pengaduan juga bisa diajukan secara berkesinambungan baik pada negara domisili maupun pada negara asal.

Mengapa: Pengaduan Panduan OECD dapat (tapi tidak menjamin) mengubah perilaku perusahaan, meningkatkan kesadaran publik dan menyediakan mekanisme remediasi keluhan.

Pernyataan akhir dan tindak lanjut:

Sebagai penutup proses ini, NCP harus mengeluarkan pernyataan akhir pada publik:

- Jika mediasi sukses, pernyataan harus merangkum masalah, proses dan kesepakatan yang dicapai bersama.
- Jika mediasi gagal, pernyataan harus merangkum masalah, proses dan rekomendasi untuk pihak-pihak yang

terlibat. OECD Watch mengharapkan NCP untuk menyertakan pengkajian pelanggaran dalam pernyataan akhir.

- Pernyataan harus menyertakan syarat untuk pemantauan dan tindak lanjut berdasarkan kesepakatan. Berantisipasi terhadap komentar pada draft-draft dan negosiasi susunan kata.

OECD Watch dan Panduan OECD

OECD Watch bertujuan untuk memastikan aktivitas bisnis berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan dan pemberantasan kemiskinan. Tujuan OECD Watch juga untuk menjaga tanggung jawab perusahaan atas dampaknya di seluruh dunia.

OECD Watch adalah jaringan global dengan lebih dari 80 anggota di 45 negara. Keanggotaan terdiri dari organisasi masyarakat sipil yang beragam dan terikat pada komitmen mereka untuk memastikan bahwa aktivitas bisnis berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan dan pemberantasan kemiskinan, juga untuk menjaga tanggung jawab perusahaan atas dampaknya di seluruh dunia. Dalam ketiadaan kerangka yang mengikat tanggung jawab perusahaan secara global, OECD Watch adalah satu dari beberapa mekanisme yang tersedia untuk menjaga perusahaan untuk bertanggung jawab atas operasi internasionalnya.

Lobi & Advokasi: Sebagai pemegang kepentingan yang diakui, OECD Watch bertindak sebagai perantara yang membawa perspektif dan kepentingan LSM serta komunitas yang dirugikan ke dalam diskusi kebijakan pada Komite Investasi OECD. Sebagai tambahan dari pemantauan dan advokasi untuk peningkatan performa NCP dan implementasi Panduan, OECD Watch mengembangkan rekomendasi kebijakan bagi topik yang beragam; mulai dari sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi yang berkaitan dengan investasi internasional dan aktivitas bisnis. Jaringan ini mengadvokasi kebijakan-kebijakan dan posisi-posisi dalam interaksinya dengan pembuat kebijakan, perusahaan-perusahaan dan serikat perdagangan.

Peningkatan pengetahuan & keahlian serta dukungan:

OECD Watch mendukung organisasi masyarakat sipil dan komunitas dengan mengadakan seminar peningkatan pengetahuan dan keahlian; memberikan rekomendasi terinci pada proses pengaduan Panduan bagi mereka yang mempertimbangkan dan terlibat dalam sebuah kasus; mengembangkan dan menyebarkan panduan tentang cara mengartikan dan menggunakan Panduan; serta menyediakan sejumlah kecil dana bagi LSM yang membutuhkan dan yang aktivitasnya berkontribusi pada tujuan keseluruhan jaringan.

Riset & analisa: OECD Watch meneliti dan menganalisa berbagai aspek implementasi, keefektifan dan dampak Panduan OECD. OECD Watch percaya bahwa pengujian efektivitas Panduan OECD dan pemaparan kekurangannya pada instrumen dan perorangan dapat meningkatkan performa NCP. Jaringan ini memiliki database online semua kasus-kasus Panduan yang diajukan oleh LSM, dan menerbitkan Quarterly Case Update (Berita Kasus Terkini setiap 4 bulan), termasuk perkembangan sebuah kasus dan analisa kasus.

Instrumen akuntabilitas perusahaan lainnya: Selain Panduan OECD, OECD Watch juga berkontribusi pada upaya advokasi lainnya untuk kerangka penguatan akuntabilitas perusahaan di seluruh dunia.

Tentang brosur ini

Brosur ini menyajikan rangkuman Panduan OECD untuk Perusahaan Multi Nasional dan mekanisme pengaduan yang terkait. Organisasi masyarakat sipil, pekerja, komunitas, dan perorangan yang terkena dampak pelaksanaan bisnis yang tidak bertanggung jawab dapat menggunakan Panduan ini untuk meminta perusahaan supaya bertanggung jawab. Secara singkat brosur ini menjelaskan cara-caranya.

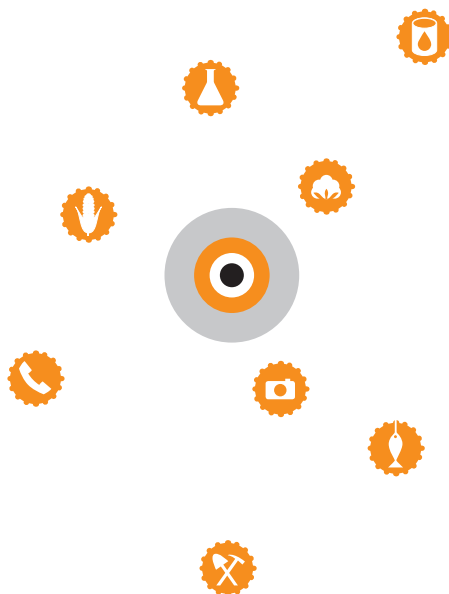
Untuk informasi lebih terinci tentang OECD Watch dan Panduan OECD untuk Perusahaan Multi Nasional, silakan kunjungi website OECD Watch (www.oecdwatch.org)

Tentang OECD Watch

Berdiri pada tahun 2003, OECD Watch adalah jaringan global dengan lebih dari 80 anggota di 45 negara. Keanggotaan terdiri dari organisasi masyarakat sipil yang beragam dan terikat pada komitmen mereka untuk memastikan bahwa aktivitas bisnis berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan dan pemberantasan kemiskinan, juga untuk menjaga tanggung jawab perusahaan atas dampaknya di seluruh dunia.

OECD Watch
Sarphatistraat 30
1018 GL Amsterdam
The Netherlands

+31 20 6391291
info@oecdwatch.org
www.oecdwatch.org



Brosur ini dapat diproduksi berkat dukungan dana dari Kementerian Luar Negri Belanda dan Kementerian Luar Negri Norwegia. Isi dari publikasi ini merupakan tanggung jawab OECD Watch dan tidak merefleksikan pandangan para penyokong dana.

Juni 2012